

Analisis Kausalitas Kebebasan Sipil dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Zainuddin ^{1*}, Muhammad Bakri ², Muhammad Farras Mufadhdhal ³

^{1*,2,3} Universitas Serambi Mekkah, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

Abstrak. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menguji pengaruh kausalitas antara kebebasan sipil dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang dipergunakan adalah data panel dari 34 provinsi yang ada di Indonesia selama periode 2021 hingga 2019 dan alat analisis setelah dilakukan uji pemilihan model analisis ditetapkan yang baik digunakan dalam analisis ini adalah common effect model. Hasil dari analisis ini diadapat bahwa kebebasan sipil signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap kebebasan sipil di Indonesia. Kemampuan kebebasan sipil dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam analisis ini.

Kata kunci: Kausalitas; Pertumbuhan Ekonomi; Kebebasan Sipil.

Abstract. The purpose of this analysis is to examine the causal relationship between civil liberties and economic growth in Indonesia. The data used are panel data from 34 provinces in Indonesia from 2021 to 2019, and the analysis tool after testing the selection of suitable analytical models to use in this analysis is the common effects model. The results of this analysis show that while civil liberties are positively important to Indonesia's economic growth, economic growth is not important to Indonesian civil liberties. Civil liberties capacity can affect economic growth by 0.17%, the rest is influenced by other variables not included in this analysis.

Keywords: Causality; Economic Growth; Civil Liberties.

* Author. Email Corresponding: zainuddin@serambimekkah.ac.id *

Pendahuluan

Demokrasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi (Qureshi, Ahsan, & Wang, 2015). Namun, ada pendapat yang berbeda bahwa demokrasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek (Arfaoui, 2016), dan bahwa demokrasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi ketika stabilitas rezim dikendalikan (Qureshi et al., 2016). Selain itu, stabilitas politik berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Zghidi, 2017). Lingkungan politik yang stabil merupakan elemen yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi (Uddin et al., 2017). Kemudian, ketidakstabilan bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan geografis, seperti yang dinyatakan oleh (Zallé, 2017) bahwa ketidakstabilan politik yang timbul di suatu negara tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut, tetapi juga mempengaruhi ekonomi negara-negara tetangga di kawasan geografis terdekat.

Upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan sungguh-sungguh menciptakan aktivitas ekonomi yang dapat bermuara kepada pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan kondisi demokrasi yang semakin menuju ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu, hal ini ditandai dengan terciptanya sistem multi partai dalam penyelenggaraan pemerintahan, terciptanya kemandirian lembaga-lembaga pemerintah dalam melakukan pelayanan publik yang lebih baik dan penegakan hukum yang lebih baik dari waktu ke waktu, serta pemerintah pusat memberi ruang yang besar kepada pemerintah daerah dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal itu sendiri merupakan memberi wewenang yang luas kepada pemerintah subnasional terutama dalam hal penentuan anggaran belanjanya (Zainuddin, Masbar, Nazamuddin, & Nasir, 2017). Desentralisasi fiskal juga bertujuan seperti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien (Jia, Guo, dan Zhang 2014). Dengan adanya otonomi daerah, maka kehidupan demokrasi di setiap daerah akan lebih baik dari

waktu ke waktu. Dengan terciptanya demokrasi yang lebih baik di setiap daerah di Indonesia, maka diharapkan dapat memacu aktivitas yang menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah-pemerintah daerah masing-masing. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya dipengaruhi oleh keadaan demokrasi berupa tingkat kebebasan sipil, tingkat hak-hak politik masyarakat, dan aspek, seperti yang dinyatakan oleh Ray (2011) bahwa demokrasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif, dan adanya hubungan positif antara institusi politik (hak politik dan kebebasan sipil) dengan pertumbuhan ekonomi (Zouhaier, 2012).

Kebebasan sipil yang terlihat semakin menjadi tren ke arah yang lebih baik, serta penegakan hukum di setiap daerah relatif berjalan memadai. Namun, walaupun terjadi kebebasan sipil yang memadai tetapi belum mampu menciptakan peningkatan aktivitas ekonomi untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Oleh karena itu, bisa kita lihat bahwa di satu sisi perkembangan demokrasi berupa kebebasan sipil terus membaik dari tahun ke tahun dan pada sisi yang lain pertumbuhan ekonomi sangatlah lambat. Dengan demikian, dalam analisis ini dapat diformulasikan pertanyaan penelitian bagaimanakah hubungan antara kebebasan sipil dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Tinjauan Literatur

Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa teori pertumbuhan ekonomi, seperti teori pertumbuhan klasik dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Maltus dan Jhon Stuart Mill yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: luas tanah, jumlah penduduk, jumlah barang dan modal, dan teknologi yang digunakan. Selanjutnya, teori pertumbuhan Neo-klasik pertama sekali dikembangkan oleh Robert Solow yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari pertambahan dan perkembangan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran agregat (Simon, 2010). Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi memengaruhi tingkat output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang

waktu (Mankiw, 2007). Secara matematis model pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Solow adalah $Y = f(K, L, A)$. Dimana, K adalah faktor modal; L adalah faktor tenaga kerja, dan A adalah faktor teknologi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa model ini memasukkan variabel kemajuan teknologi yang ditandai dengan efisiensi tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur oleh dua indikator utama yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) untuk ruang lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk ruang lingkup regional. Menurut Mankiw (2007) PDB adalah nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. Definisi PDB didasarkan pada total nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), dan proses evaluasi juga melibatkan jumlah nilai tambah pada setiap tahap produksi (tahap peralihan) dari semua komoditas akhir (barang dan jasa) yang diproduksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu secara moneter (Kira, 2013).

PDRB suatu wilayah berhubungan dengan demokrasi, karena demokrasi telah memberi ruang yang cukup besar pada kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi (Sugiyanto, 2013). Di Indonesia demokrasi ditandai dengan adanya jaminan hukum dan adanya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pilkada secara langsung pun turut mendukung mekanisme demokrasi terutama di tingkat daerah setelah disahkannya UU No. 32 Tahun 2004.

Demokrasi

Praktek demokrasi akan memberikan peluang investasi dan kinerja ekonomi suatu wilayah ke arah yang lebih baik karena demokrasi akan menghasilkan kepemimpinan dari hasil pemilihan rakyat yang demokratis dan tercipta kebebasan sipil serta terwujudnya kelembagaan yang baik, sesuai yang dinyatakan oleh Gerring et al. (2011) bahwa demokrasi mungkin

memiliki beberapa efek positif langsung misalnya, stabilitas yang lebih besar atau hak kepemilikan yang lebih luas. Sehingga, dengan praktek demokrasi yang baik dan benar akan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, seperti yang dinyatakan oleh Rachdi & Saidi (2015) bahwa akuntabilitas demokratis akan mengurangi korupsi dan konflik eksternal karena sistem politik berfungsi dengan baik dan demokrasi dapat memberikan kontribusi positif pada tingkat pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi membutuhkan perlindungan jangka panjang atas kebebasan sipil dan politik.

Namun setiap Negara akan memiliki pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini tergantung pada praktek demokrasi yang dijalankan di masing-masing negara. Bahwa hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan PDB riil bervariasi dengan tingkat kemampuan kognitif suatu negara Salahodjaev, (2015). Dengan praktek demokrasi yang baik, maka politik di suatu wilayah akan stabil dan akan tercipta juga demokrasi ekonomi, sehingga situasi ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Riza (2013) bahwa demokrasi politik memengaruhi pertumbuhan ekonomi transisi secara tidak langsung melalui ekonomi demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: kebebasan sipil/*civil liberty*, hak-hak politik/*political rights*, dan lembaga-lembaga demokrasi/*institution of democracy* BPS, (2018). Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi utama dari konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut *civil liberties* dan *political rights* tidak mungkin dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya wadah, struktur dan prosedur pendukung, maka cukup beralasan bila kemudian institusi demokrasi *institution of democracy* juga harus diartikulasi sebagai bagian dari aspek penting demokrasi. Adapun matriks indeks demokrasi, seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks	Makna
< 60	Kinerja Demokrasi Buruk
– 80	Kinerja Demokrasi Sedang
80 >	Kinerja Demokrasi baik

Sumber: www.bps.go.id (2018).

**Pengaruh Demokrasi terhadap
Pertumbuhan Ekonomi**

Demokrasi yang memberi ruang yang sama kepada warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi sudah barang tentu akan berdampak pada kegairahan kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, seperti, yang dinyatakan oleh Ray (2011) bahwa demokrasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian, Zouhaier (2012) menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara institusi politik (hak politik dan kebebasan sipil) dengan pertumbuhan ekonomi (Zouhaier, 2012). Demokrasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi transisi (Riza, 2013). Kemudian, menciptakan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh modal manusia disertai ditegakkannya nilai-nilai kebebasan, seperti yang dinyatakan oleh Fabro & Aixalá (2014) bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu adanya investasi di bidang modal manusia, perlu ditegakkannya kebebasan sipil dan hak politik. Salahodjaev (2015) menyatakan bahwa hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi bervariasi antar negara dan apabila lembaga demokrasi lemah akan berbahaya bagi pembangunan ekonomi sebuah negara. Selanjutnya, kontinuitas politik sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi (Qureshi et al., (2016). Pertumbuhan ekonomi juga akan tercipta apabila lembaga pemerintahan berjalan dengan benar, seperti yang dinyatakan oleh Huang & Ho (2016) bahwa terdapat hubungan kausalitas yang signifikan dari sebagian besar dimensi pemerintahan terutama untuk efektivitas pemerintah dan supremasi hukum terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi bukan terjadi secara langsung, melainkan efek yang terjadi dari demokrasi yang akan berdampak pada pertumbuhan

ekonomi, seperti yang dinyatakan oleh Arfaoui (2016) bahwa demokrasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Selain itu, demokrasi memiliki efek positif pada pertumbuhan, walaupun efeknya tidak langsung dalam arti bahwa demokrasi memengaruhi pertumbuhan melalui peningkatan kualitas modal manusia atau memperkuat perlindungan hak properti (Knutson, 2012).

Metodologi Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi 33 wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel yakni menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Fokus penelitian pada pertumbuhan ekonomi dan indeks demokrasi yang diukur dengan indeks kebebasan sipil per provinsi selama periode 2012 sampai dengan 2019.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi, yaitu dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui www.bps.go.id. Dalam menguji pengaruh kausalitas demokrasi yang diukur dengan kebebasan sipil terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kebebasan sipil dilakukan dengan model regresi data panel berbasis *path analysis*. Dengan demikian, dapat diformulasikan persamaan dasar pengujian adalah $PE = f(KS)$ dan $KS = f(PE)$. Menurut Green (2012:349), secara umum regresi data panel adalah $Y_{it} = \alpha + X'_{it}\beta + \varepsilon_{it}$ dimana, $i = 1,...,n$, dan $t = 1,...,T$. Berdasarkan persamaan dasar penelitian ini, maka dapat diformulasikan persamaan regresi linier penelitian ini adalah $PE_{it} = \beta_0 + \beta_{11}KS_{it} + \varepsilon_1$ dan $KS_{it} = \beta_0 + \beta_{21}PE_{it} + \varepsilon_2$. Dimana, PE_{it} adalah Pertumbuhan ekonomi, KS_{it} adalah Kebebasan sipil, I adalah *Cross section* ($i = 1,..., N$), t adalah *Time series* ($t = 1,...,T$), β_0 adalah Konstanta, β_1 , dan β_2 adalah koefisien atau parameter yang ditaksir, dan ε_1 , dan ε_2 , adalah *error term*. Untuk memilih model analisis dilakukan 1) uji Chow, yaitu untuk memilih regresi data panel antara *fixed effect model* dengan *common effect model*. Jika nilai *probabilitas cross-section F* lebih kecil dari nilai kritis (*prob.cross-section F* < 0.05), maka *fixed effect model* lebih baik dari pada *common effect model*. Jika *prob.cross-section F* > 0.05, maka *common effect*

model lebih baik digunakan. 2) uji Hausman, yaitu untuk memilih model yang baik digunakan antara *fixed effect model* dan *random effect model*. Jika nilai probabilitas *cross-section random* lebih besar dari nilai kritis ($prob.cross-section random > 0.05$), maka *random effect model* lebih baik dari pada *fixed effect model*. Jika $prob.cross-section random < 0.05$, maka *fixed effect model* lebih baik digunakan dibandingkan dengan *random effect model*, dan 3) uji Lagrange Multiplier, yaitu dilakukan apabila hasil uji Chow dan uji Hausman tidak memiliki hasil yang konsisten. Dimana, dalam uji Lagrange Multiplier untuk memilih antara *common effect model* dan *random effect model*. Apabila nilai probabilitas Both-Breusch pagan lebih kecil dari nilai kritis, maka model yang terpilih adalah *random effect model*, dan sebaliknya apabila nilai probabilitas Both-Breusch pagan lebih besar dari nilai kritis, maka model yang terpilih adalah *common effect model*. Selanjutnya, dalam analisis ini akan dilakukan pengujian sebagai berikut:
 H_a : Jika nilai $prob. t$ lebih besar dari nilai kritis

($prob.t > 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa menerima hipotesis null (H_0).dan menolak hipotesis alternatif (H_a). Artinya *variabel endogen*, secara parsial memiliki pengaruh terhadap *variabel eksogen*.
 H_0 : Jika $prob. t$ lebih kecil dari nilai kritis ($prob.t < 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa menolak hipotesis null (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_a). Artinya *variabel endogen*, secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap *variabel eksogen*.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel pertumbuhan ekonomi, dan kebebasan sipil. Diskripsi statistik dari variabel tersebut seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Diskripsi Statistik Variabel Penelitian

	PE	KS
Rata-rata	4,581347	71,40290
Maximum	21,76	98.44
Minimum	-20,13	47,21
Std. Dev.	4,035947	10,59311
Observations	297	297

Sumber : Data diolah, 2021 .

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa rata-rata nilai selama periode pengamatan adalah 4,58 satuan untuk pertumbuhan ekonomi, indeks kebebasan sipil, 72,4 satuan indeks untuk hak-hak politik, dan 72,52 untuk indeks kelembagaan. Nilai maksimum laju pertumbuhan ekonomi sebesar 21,76 satuan terjadi tahun 2015 di provinsi Nusa Tenggara barat, dan nilai minimumnya sebesar -20,13% terjadi tahun 2020 di provinsi Papua, dan nilai standar deviasi sebesar 4,0359 menandakan variabilitas sebaran data pertumbuhan ekonomi. Nilai maksimum indeks kebebasan sipil sebesar 98,44 satuan terjadi tahun 2016 di provinsi Kalimantan Utara, dan nilai minumnya sebesar 47,21 terjadi tahun 2014 di provinsi Sumatera Barat, dan nilai standar deviasi sebesar 10,7441 menandakan variabilitas sebaran data kebebasan sipil.

Pemilihan Model Analisis

Penelitian ini menggunakan data panel, maka harus dipilih model analisis yang terbaik untuk melakukan analisis data yang dimaksud. Adapun pemilihan model analisis dengan 1) uji Chow didapat nilai *Cross-section F* sebesar 0,0000 ($0,0000 < 0,05$), maka disimpulkan *fixed effect model* lebih baik digunakan, 2) uji Hausman didapat nilai *Cross-section random* sebesar 0,9994 ($0,9994 > 0,05$), maka disimpulkan *random effect model* lebih baik digunakan, karena uji Chow dan uji hausman tidak konsisten untuk model analisis data, maka perlu dilakukan uji *Lagrange Multiplier*, dan 3) uji *Lagrange Multiplier* didapatkan nilai probabilitas Both-Breusch pagan sebesar 32.43044 ($32,43044 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa *common effect model* lebih baik digunakan. Dengan demikian, dalam analisis ini model analisis data dipergunakan *common effect*

model.

Pembahasan

Untuk analisis data dipergunakan *common effect model*, yaitu untuk pengaruh kebebasan sipil (KS) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Pengaruh Kebebasan Sipil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variable	Coefficient	Prob.
KS	0,008556	0,0354
<i>R-squared</i>	0,016279	

Dependent Variable: PE.

Untuk pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kebebasan sipil di Indonesia, seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 4. Uji Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap kebebasan Sipil

Variable	Coefficient	Prob.
PE	0,150785	0,4949
<i>R-squared</i>	0,001727	

Dependent Variable: KS.

Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa nilai Probabilitas *t* sebesar 0,0354 ($0,0354 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa kebebasan sipil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 0,008556 satuan. Pengaruh ini dapat dimaknai bahwa apabila terjadi satu satuan kebebasan sipil, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,008556 satuan. Kemampuan kebebasan sipil dalam menjelaskan, seperti ditujukan oleh nilai *R-squared* sebesar 0,001727 satuan atau 0,17%. Selanjutnya, berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa nilai Probabilitas *t* sebesar 0,4949 ($0,4949 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap kebebasan sipil di Indonesia. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak dapat mempengaruhi kebebasan sipil di Indonesia, hal ini bisa disebabkan bahwa kebebasan sipil terjadi dari kebijakan yang dilahirkan dari kompromi antara eksekutif dengan legislatif.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya terlihat bahwa adanya hubungan positif kebebasan sipil terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebebasan sipil itu akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri dengan cara memberikan ruang yang luas kepada masyarakat dalam berusaha atau dengan kata lain masyarakat ikut aktif beraktivitas dengan leluasa secara bebas. Namun, keadaan berbeda ditujukan oleh pertumbuhan ekonomi tidak ada hubungan dengan kebebasan sipil itu sendiri. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak memberi dampak apapun terhadap kebebasan sipil itu sendiri, dan ini bisa jadi karena kebebasan sipil lahir dari kebijakan yang dihasilkan dari kompromi antara eksekutif dengan legislatif. Selanjutnya, kemampuan variabel kebebasan sipil mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17% dan selebihnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam analisis ini.

Dalam rangka menjaga atau menciptakan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, maka perlu kiranya untuk menciptakan keadaan yang kondusif serta dengan menjunjung tinggi azas demokrasi terutama dalam bidang kebebasan sipil. Karena terbukti bahwa kebebasan sipil itu sendiri dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terlihat juga bahwa dengan terciptanya kebebasan sipil, maka keadaan kehidupan masyarakat akan lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam bidang ekonomi yang dapat memotivasi masyarakat (masyarakat bisnis) melakukan aktivitasnya yang pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdurruh, Qureshi; Tanveer, Ahsan; Man, W. (2016). *Democracy , Regime Stability and Economic Growth : A Cross Country Dynamic Panel Data Analysis . January 2015*.
- Adam, A., & Filippaios, F. (2007). Foreign direct investment and civil liberties: A new perspective. *European Journal of Political Economy*, 23(4), 1038-1052.
- Arfaoui, L. (2016). *The Relationship between Democracy and Economic Growth in Tunisia : An Application of Autoregressive Distributed Lag Model*. 4(1), 137–150. DOI: <https://doi.org/10.5296/ijssr.v4i1.8870>.
- Azman-Saini, W. N. W., Baharumshah, A. Z., & Law, S. H. (2010). Foreign direct investment, economic freedom and economic growth: International evidence. *Economic Modelling*, 27(5), 1079-1089.
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of personality and social psychology*, 51(6), 1173.
- Bashir, M. F. (2014). *Impact of Political Freedom , Economic Freedom and Political Stability on Economic Growth*. 5(22), 59–68.
- Busse, M. (2003). Democracy and FDI. Available at SSRN 384480.
- Bazzaz, Najah Hawar Saeed, and Jingxian Zou. 2021. "Evaluating the Effect of Improvement of Democracy Index on Economic Growth: A Study of a Selected Sample of Developing Countries." *REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION* 11 (5): 3583–91. DOI: <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.05.244>.
- Charles, G., & Jacob, H. (2017). Effects of political stability and sector regulations on investments in African mobile markets. *Telecommunications Policy*, June, 1–11. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2017.07.005>.
- Dr. Sauwaluck Koojaroenprasit. (2012). The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of South Korea. *The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of South Korea*.
- Fabro, G., & Aixalá, J. (2014). *Direct and Indirect Effects of Economic and Political Freedom on Economic Growth*. April 2015, 37–41. DOI: <https://doi.org/10.2753/JEI0021-3624460411>.
- Gerring, J., Bond, P., Barndt, W. T., Moreno, C., Gerring, B. J., Bond, P., Barndt, W. T., & Moreno, C. (2011). *Politics: Democracy and Economic Growth: A Historical Perspective* How to cite this article : *A Historical Perspective*. May 2015, 323–364. DOI: <https://doi.org/10.1353/wp.2006.0002>.
- Huang, C., & Ho, Y. (2016). North American Journal of Economics and Finance Governance and economic growth in Asia q. *North American Journal of Economics and Finance*, 100. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.najef.2016.10.010>.
- Jaff, M. R., McMurtry, M. S., Archer, S. L., Cushman, M., Goldenberg, N., Goldhaber, S. Z., ... & Zierler, B. K. (2011). Management of massive and submassive pulmonary embolism, iliofemoral deep vein thrombosis, and chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*, 123(16), 1788-1830.

- Jensen, N. (2008). *Political Risk, Democratic Institutions, and Foreign Direct Investment*. 70(4), 1040–1052. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0022381608081048>.
- Kira, A. R. (2013). The Factors Affecting Gross Domestic Product (GDP) in Developing Countries: The Case of Tanzania. *European Journal of Business and Management*, 5(4), 2222–2839.
- Knutsen, C. H. (2012). *Democracy and economic growth: A survey of arguments and results*. DOI: <https://doi.org/10.1177/2233865912455268>.
- Minea, A. (2018). *Forms of democracy and economic growth volatility* ☆. December 2017, 1–10. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.07.013>.
- Mintarti, S. (2017). Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja, 13(1), 28–38.
- Nayebyazdi, Arash. 2017. “The Relationship Between Democracy And Economic Growth In Muslim Mena Countries (Spatial Econometric Approach)” 2 (3): 123–35.
- Nairobi, Nairobi, Nur Rita Santi, and Fadeli Yusuf Afif. 2021. “The Impact of the Quality of Democracy on the Economic Growth of Provinces in Indonesia.” *Journal of Governance and Accountability Studies (JGAS)* 1 (2): 121–32.
- Nomor, T. D., & Iorember, P. T. (2017). Political stability and economic growth in Nigeria. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 8(2).
- Oktavia, R., & Sorto, M. A. (n.d.). *Confirmatory And Exploratory Factor Analyses Of Students’ Developmental Levels In Learning Statistics*.
- Qureshi, A., Ahsan, T., & Wang, M. (2016). *Democracy , Regime Stability and Economic Growth : A Cross Country Dynamic Democracy , Regime Stability and Economic Growth : A Cross Country Dynamic Panel Data Analysis . January 2015*.
- Rachdi, H., & Saidi, H. (2015). *Democracy and Economic Growth: Evidence in MENA countries*. 191, 616–621. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.644>.
- Ray, S. (2011). *Regional analysis on the relationship between Economic Growth and Democracy: Evidence from India Abstract: Introduction: 2(2), 1–24*.
- Rıza, A. (2013). *Democracy and Growth: Evidence from Transition Economies*. 3(1), 63–75.
- Salahodjaev, R. (2015). Intelligence Democracy and economic growth: The role of intelligence in cross-country regressions. *Intelligence*, 50, 228–234. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.intell.2015.04.013>.
- Simon, H. A. (2010). A Contribution to the Theory of Economic Growth Author (s): Robert M . Solow Source: The Quarterly Journal of Economics , Vol . 70 , No . 1 (Feb ., 1956), pp . 65-94 Published by: The MIT Press Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/1884513>. *Growth Lakeland*, 70(1), 65–94. DOI: <https://doi.org/10.1093/qje/qjr044>. Advance.
- Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. *Sociological methodology*, 13, 290-312.
- Sugiyanto, C., Handoko, B. S., & Adinusa, I. (2013). *Pengaruh Konsentrasi Partai Politik di Daerah terhadap Pertumbuhan Impact of Political Concentration in the Regional Government to the Regional Economic Growth Pendabuluan*. 13(2), 109–124.

- Uddin, A., Ali, H., & Masih, M. (2017). Political stability and growth: An application of dynamic GMM and quantile. *Economic Modelling*, April, 1–16. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.04.028>.
- Vondrová, A., & Fifeková, E. (2016). Impact of economic freedom on economic development: A nonparametric approach to evaluation. *Eur. Sci. J*, 12, 218–226.
- Zallé, O. (2017). *Spatial Effect of Political Risk on Economic Growth in Africa*. 1383–1399. DOI: <https://doi.org/10.4236/me.2017.812093>.
- Zghidi, N. (2017). *Do Political Stability and Democracy Increase National Growth? Evidence from African Countries Using the GMM Method*. 5(1), 1–5. DOI: <https://doi.org/10.4172/2375-4389.1000242>.
- Zouhaier, H. (2012). *Institutions , Investment and Economic Growth*. 4(2), 152–162. DOI: <https://doi.org/10.5539/ijef.v4n2p152>.
- Zouhaier, H., & Karim, K. M. (2012). *Democracy , Investment and Economic Growth*. 2(3), 233–240.